

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam era globalisasi saat ini persaingan dalam berbagai hal nampak sangat jelas terjadi, berbagai cara dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik melalui cara yang wajar maupun melalui cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banyak upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan keinginannya, salah satunya yang paling menarik perhatian adalah tindakan yang melanggar hak cipta karya seni dari seseorang untuk digunakan demi kepentingan dirinya sendiri. Salah satu yang banyak terjadi pada saat ini adalah pembajakan karya seni orang lain melalui media internet.

Di Indonesia, pengaturan tentang hak cipta mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian undang-undang yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 6 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan diperbaharui lagi dengan undang-undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terakhir dengan undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan yang terbaru undang-undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC).

UUHC atau Undang-Undang Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam perlindungan hak tersebut, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, sampul karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya

tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalihwujudannya.<sup>1</sup>

Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai Undang-Undang itu, dalam tulisan ini pembahasannya akan dikhususkan pada kasus terkait Hak Cipta atas hasil fotografi yang berupa foto dimana kasus ini telah di putus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Niaga Surabaya dengan putusan NO.10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN NIAGA SBY, dan putusan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan putusan NO.262K/Pdt.Sus-HKI/2016.

Kasus ini bermula pada saat Penggugat yaitu dr Arnold yang merupakan karyawan dari Tergugat yaitu Rumah Sakit Siloam International Hospitals Surabaya difoto oleh pihak tergugat pada sekitar bulan Desember 2011 yang berlokasi di Rumah Sakit milik tergugat Pada saat itu tidak ada sama sekali penjelasan dari Tergugat mengenai tujuan pemotretan tersebut Tanpa curiga Tergugat menerima pemotretan dadakan itu dengan senang hati. Kemudian pada awal bulan Februari Tahun 2012 tanpa sepengetahuan dari Penggugat, pihak Tergugat menggunakan Potret dari Penggugat sebagai sarana promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan Rumah Sakit milik Tergugat. Hal ini diketahui Penggugat dari kawannya yang tiba-tiba menunjukkan brosur yang ditempatkan di meja resepsionis.

---

<sup>1</sup> Hukum online, *Pengaturan Hak Cipta di Indonesia*, diakses dari <http://www.hukumonline.com>, pada 10 Juni 2017

Penggugat terkejut saat tahu bahwa potret dirinya dijadikan sarana komersial berupa brosur. Selain itu Penggugat juga menemukan bahwa ternyata Tergugat menggunakan Potret dari Penggugat untuk digunakan sebagai iklan yang telah dimuat pada Harian Jawa Pos tanggal 16 April 2012 dengan judul Emergency & Trauma Center terbaik.

Atas hal tersebut, Penggugat mengambil langkah tegas dengan mengajukan gugatan perdata terkait pelanggaran Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta ke Pengadilan Niaga Surabaya. Menanggapi gugatan Penggugat, Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan gugatan penggugat tersebut yang diputus pada 13 April 2015, yang inti dari amar putusannya yaitu, Majelis hakim menghukum Tergugat (RS International Hospitals Surabaya) untuk membayar ganti rugi ke penggugat sebesar Rp 200 juta. Pengadilan Niaga Surabaya juga menjatuhkan denda uang paksa Rp 500 ribu per hari kepada Tergugat.

Atas putusan Pengadilan Niaga Tersebut, giliran Tergugat yang tidak terima dan mengajukan kasasi yang isinya antara lain :

"Penggugat tidak mampu membuktikan secara konkrit nilai kerugian yang sesungguhnya diderita (actual loss) atas penggunaan foto Penggugat untuk brosur dan iklan sehingga gugatan a quo terdapat ketidakjelasan atau kesimpangsiuran," Menurut Tergugat, seharusnya Penggugat membuktikan kerugian yang rinci, riil dan konkrit. Pihak Tergugat menyanggah argumen Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan gugatan perdata tidak harus dibuat rinci tetapi sederhana sesuai Putusan Nomor 24 K/AG/2003 tertanggal 23 Februari 2004.

Tergugat menyatakan :

"Adanya ketidakjelasan itu telah menyebabkan perkara gugatan inlitis tidak dapat diadili secara objektif dan adil, sedangkan gugatan a quo telah menuntut adanya kewajiban pembayaran sejumlah uang maka harus dibuktikan secara riil, rinci, dan konkret,".

Selain itu Tergugat merujuk pada surat perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang salah satunya menyatakan Penggugat berjanji mematuhi pedoman kode etik dan tunduk serta patuh terhadap peraturan perusahaan. Tergugat memaparkan pasal 17 Peraturan Perusahaan Periode 2011-2013 yang menyatakan:

*“Segala bentuk barang (baik yang kasat mata atau tidak), jasa, sistem, prosedur, dan lain-lain yang diciptakan atau hasil perubahan (modifikasi) dari yang sudah ada oleh pekerja selama bekerja di perusahaan dan terkait dengan hak ciptanya dimiliki oleh perusahaan”.*

Terkait hal tersebut Tergugat menyatakan :

"Maka dipandang konstruksi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sejatinya telah terjadi pengalihan hak ekonomi atas objek hak cipta dari karyawan kepada Tergugat sebagai perusahaan,"

Tergugat juga berdalih bahwa sejatinya penggunaan foto para karyawannya untuk kegiatan promosi sudah lazim. Khususnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa guna menunjukkan mutu dan kualitas layanan jasa yang diberikan. Seperti iklan maskapai penerbangan dengan menggunakan model pramugari.

Oleh karena itu tergugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasinya

Akhirnya setelah persidangan Mahkamah Agung memutuskan pada 13 April 2016 yang inti putusannya adalah :

"Menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 200 juta. Mahkamah Agung menyatakan Tergugat nyata-nyata melanggar Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal itu berbunyi:

*“Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”*

Majelis kasasi menolak menjatuhkan hukuman uang paksa (dwangsom).

"Karena tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang ganti rugi,"

Permasalahan Hukum didalam kasus ini tindakan yang dilakukan oleh tergugat adalah tidak sesuai atau melanggar pasal 12 ayat 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang isinya :

*“Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”*

Hal ini karena tergugat telah menggunakan potret yang memuat gambar penggugat untuk iklan rumah sakit milik tergugat tanpa seizin ataupun persetujuan tertulis dari Penggugat.

Setelah mengkaji dari dalam kasus ini ada Kontroversi yang muncul yaitu :

“Apakah Perusahaan memiliki hak penggunaan secara eksternal atas potret karyawan/pegawainya berdasarkan perjanjian kerja dan/atau peraturan perusahaan ?”

Hal ini karena itu didalam kasus ini ada peraturan perusahaan yang tentunya sudah disepakati oleh penggugat dan tergugat, yang disampaikan oleh tergugat dalam nota pembelaannya yang isi dari peraturan perusahaan tersebut menyatakan:

*“Segala bentuk barang (baik yang kasat mata atau tidak), jasa, sistem, prosedur, dan lain-lain yang diciptakan atau hasil perubahan (modifikasi) dari yang sudah ada oleh pekerja selama bekerja di perusahaan dan terkait dengan hak ciptanya dimiliki oleh perusahaan”.*

Melihat dari hal tersebut Penulis berpendapat bahwa ada masalah yang muncul disini yaitu tentang bagaimana Hubungan hukum dari perjanjian kerja ini dengan undang-undang hak cipta terkait ijin komersialisasi hak cipta atas potret antara perusahaan dan karyawan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang Penulis kemukakan tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan penulisan Skripsi dengan tema hak cipta dengan mengambil judul **“Konstruksi Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Niaga Dalam Menyeslesaikan Sengketa Hak Cipta Atas Potret, (Study Putusan Mahkamah Agung No.262 K/Pdt.sus-HKI/2016 jo Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.10/HKI/Hak Cipta/2014/ PN.Niaga sby)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas, permasalahan yang hendak dikaji dalam penulisan penelitian ini adalah :

“ Bagaimana Konstruksi pertimbangan Hukum Hakim pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa terkait izin komersialisasi Hak Cipta atas foto/potret, ditinjau dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta didalam kasus Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN NIAGA SBY *jo* Putusan Mahkamah Agung No 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016. ? “

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan menggali lagi tentang Sengketa penggunaan hak cipta atas potret karyawan/pegawai oleh perusahaan, maka penelitian ini ditujukan :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa terkait konstruksi pertimbangan Hakim pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa terkait izin komersialisasi Hak Cipta atas foto/potret ditinjau dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di dalam kasus Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN NIAGA SBY *jo* Putusan Mahkamah Agung No 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam terkait dasar hukum pertimbangan Hakim pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa terkait Persetujuan Komersialisasi potret karyawan/pegawai oleh perusahaan ditinjau dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta di dalam kasus Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN NIAGA SBY *jo* Putusan Mahkamah Agung No 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

#### **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah penulis paparkan diatas maka penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat serta kegunaan sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Penelitian**

1. Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan tambahan khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan seputar hukum perdata khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual terkait Hak Cipta.
2. Penelitian ini juga sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 ilmu Hukum, sekaligus menjadi lahan aktualisasi dan pengembangan pemikiran serta wawasan penulis dalam keilmuan hukum.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dengan lahirnya tulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta mengupgrade informasi seputar Hukum Perdata dan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta di Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum Perdata dan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Penulisan hukum ini juga diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi kalangan praktisi maupun masyarakat pada umumnya sehingga menjadi



pertimbangan objektif di kalangan masyarakat maupun praktisi hukum dalam memahami dan mengkritisi Hukum Terkait Hak Cipta juga dengan ketentuan penerapan Undang-undang Hak Cipta.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>2</sup> ”dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya”. Berdasarkan ruang lingkup dan indentifikasi masalah yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang diambil ialah metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup>

Selain itu penulis juga menggunakan metode yang seringkali digunakan dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

### **2. Jenis Bahan Hukum**

Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu :

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm 93.

<sup>3</sup> *Ibid*.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>4</sup> ”bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu”. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.10/HKI/Hak Cipta/2014/PN.  
Niaga Sby
- 2) Putusan Mahkamah Agung No 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28  
Tahun 2014 Tentang Tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan  
perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa Buku-buku Hukum, Jurnal-jurnal Hukum, Karya Tulis Hukum atau Pandangan

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 157

Ahli Hukum yang termuat dalam media massa yang relevan dengan pokok bahasan penulisan hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus dan Ensiklopedia Hukum dan lain-lain.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penulisan ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum, dengan bertujuan untuk membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkap suatu kebenaran hukum.<sup>5</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum tugas akhir ini adalah dilakukan melalui model studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Informasi tersebut didapat dari beberapa perpustakaan yang ada di perguruan tinggi, dan *browsing* internet, dan *website*.

### **4. Analisa Bahan Hukum**

Dari data yang telah terkumpul selanjutnya penulis akan memulai analisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Yaitu suatu metode untuk memperoleh

---

<sup>5</sup> F. Sugeng Istanto. 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Ganda, hlm 29

gambaran singkat perihal permasalahan yang akan dikaji berdasarkan analisa yang diuji dengan norma-norma, kaidah-kaidah serta regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis. Dimulai dari Bab I sampai dengan Bab IV yang diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan latar belakang, yakni memuat landasan yang bersifat ideal *das sollen* dan kenyataan *das sein* yang melatar belakangi suatu masalah yang hendak dikaji lebih mendalam. Rumusan masalah yang diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penulisan hukum ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

dalam bab ini berisi tentang pemaparan kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, yang mana nanti akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya yakni Bab III pembahasan, dalam hal ini penulis memilih kerangka teori mengenai: (1) Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta; (2) Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab III ini akan memaparkan apa yang menjadi pokok bahasan sebagai obyek kajian dalam penulisan, fokus permasalahan yang dikaji dalam bab ini mengenai Tentang bagaimana konstruksi pertimbangan Hukum Hakim pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa Hak Cipta atas foto/potret ditinjau dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di dalam kasus Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN NIAGA SBY *jo* Putusan Mahkamah Agung No 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

Serta untuk lebih memahami tentang bagaimana dasar hukum Hakim Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa terkait izin komersialisasi hak cipta atas potret karyawan/pegawai oleh perusahaan ditinjau dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dikaji dari Putusan Pengadilan Niaga No.10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN NIAGA SBY *jo* Putusan Mahkamah Agung No 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016..kemudian semua permasalahan tersebut akan diuraikan dengan sistematika penulisan serta penggunaan bahan hukum yang telah disebutkan diatas, sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab IV ini merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan Bab III, dan berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

